



## JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

---

PERJALANAN-DINAS

2025

PERGUB GORONTALO NO. 26, BD 2025/NO.26,: 23 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERJALANAN DINAS.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman pengadministrasian Perjalanan Dinas secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur mengenai Peljalanan Dinas;
  - Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 109 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2023, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres No. 72 Tahun 2025, Permenkeu No. 113/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 119 Tahun 2023, Pergub Gorontalo No. 10 Tahun 2025;
  - Dalam Peraturan Gubenur ini memuat tentang Ketentuan Umum, Ruang lingkup, Perjalanan Dinas Jabatan, Perjalanan Dinas Pindah, Standar Biaya Perjalanan Dinas, Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Pengendalian Internal, Ketentuan lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 10 Nobember 2025.
  - Peraturan Gubernur ini, mencabut Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas
  - Peraturan Gubernur ini terdiri dari 23 halaman